

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Fakta demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami pasang surut. Perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dimulai dengan dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini, dengan mengacu pada konstitusi yang pernah ada dan atau yang sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, kemudian kembali ke UUD 1945. Pada perkembangan berikutnya UUD 1945 mengalami amandemen untuk memenuhi tuntutan reformasi kehidupan kebangsaan Indonesia. Praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

Dalam hal ini, disadari atau tidak kualitas pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia menjadi dasar bagi kekuatan aspek kehidupan lainnya. Sebagai sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Demokrasi Pancasila pada hakekatnya merupakan sarana atau alat bagi negara Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan yang mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan segala keputusan yang ditetapkan dalam permusyawaratan tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berlaku seperti

terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dalam demokrasi Pancasila rakyat merupakan subjek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta secara aktif dan efektif dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintahan atau pelaksanaan pemerintahan.

Dalam konteks ini mencerdaskan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu yakni kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila menjadi sangat penting, terlebih manakala hal itu dipandang dalam perspektif transformasi kepada masyarakat madani (*civil society*) yang dipandang tepat sebagai arah dan orientasi perubahan masyarakat Indonesia baru. Berkait dengan hal tersebut, kiranya semua pihak sepakat bahwa kualitas kehidupan demokrasi Pancasila dibangun berdasarkan faham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius menolak atheisme, kebenaran, kecintaan dan berlandaskan budi pekerti yang luhur, berkepribadian Indonesia, berkeseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhan, dapat dilakukan melalui pendidikan sebagai pranata sosial yakni suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat yang dapat dijadikan wacana investasi mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu mutu pendidikan demokrasi akan menentukan kualitas kehidupan demokrasi, kesadaran hukum masyarakat dan penegakkan *rule of law*.

Demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia merupakan salah satu tuntutan reformasi yang mulai bergerak secara dinamis sejak tahun 1998

memberikan keyakinan pada demokratisasi rakyat yakni unsur-unsur rakyat senantiasa menjadi faktor utama yang dilibatkan dalam pemerintahan, hal ini sejalan dengan pandangan Sartori (2002: 26), “demokratisasi tidak dapat didefinisikan oleh beberapa kriteria objektif yang tetap dan abadi, namun demokratisasi yang paling baik harus dipahami sebagai proses panjang yang kompleks, dinamis, dan terbuka. Kemajuan menuju konsensus politik berbasis peraturan yang lebih partisipatif.

Proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum mencapai tahap yang membanggakan dan menggemirakan. Hal ini terjadi karena pada tataran praksis terdapat kesenjangan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental dengan kehidupan nyata dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara Negara.

Terdapat sejumlah fakta bahwa pelaksanaan demokrasi yang belum sesuai dengan harapan, antara lain ditunjukkan oleh adanya kecenderungan perilaku aparat pemerintah dan negara dan khususnya perilaku masyarakat yang tidak demokratis. Pada tataran pemerintah hal ini antara lain ditandai dengan perilaku elit politik yang kurang menghargai pendapat pihak lain, yang marah jika dikritik, dan belum mampu menegakkan supremasi hukum. Sementara itu, di kalangan masyarakat bawah pemikiran atau tindakan yang berlawanan dengan azas demokrasi seperti anti demokrasi begitu menggejala secara kentara, misalnya beberapa anggota masyarakat masih belum mampu menghargai perbedaan pendapat, melakukan demonstrasi yang anarkhis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, main hakim sendiri, pelanggaran hak asasi manusia, dan perilaku lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang

mencerminkan kebebasan individu dalam masyarakat, nilai-nilai demokrasi dan mengabaikan supremasi hukum. (Al Muchtar:1999)

Sementara itu, di lingkungan pendidikan formal pun saat ini menghadapi masalah yang cukup mengkhawatirkan, karena interaksi sosial yang dilakukan masih belum sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Interaksi sosial di lingkungan sekolah dan kelas masih belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tercermin dari kebijakan pendidikan pada umumnya masih top-down, kepala sekolah masih tergantung pada atasannya. Sikap feodalisme kepala sekolah kadang-kadang bahkan masih sangat kentara misalnya kepala sekolah sangat dominan dalam mengambil kebijakan, Kepala sekolah belum terbiasa untuk menerima perbedaan pendapat sehingga perbedaan pendapat di lingkungan sekolah kurang dihargai. Di sisi lain para guru dan karyawan juga masih banyak yang belum berani mengemukakan pendapat atau berbeda pendapat dengan pihak kepala sekolah. Sementara itu, pendapat para siswa pun masih sering kurang didengarkan oleh pihak sekolah. Semua kebijakan yang menyangkut siswa seringkali secara sepihak ditentukan oleh pihak sekolah, dan siswa hanya berhak untuk menerimanya.

Terdapat sejumlah fakta bahwa pengalaman dan pendidikan demokrasi atau dalam hal ini pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi selama ini masih lemah, terlebih berada dalam proses beralih dari kehidupan politik yang bernuansa otoriter kepada kehidupan yang demokratis. Di kalangan sebagian siswa sekarang muncul gejala semakin meningkatnya perilaku-perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks di luar nikah, pencurian, maraknya gengster diantara pelajar dan pelanggaran hukum lainnya. Gejala semakin melemahnya nilai-

nilai demokrasi terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari rendahnya perilaku, kapasitas dan keterampilan siswa dalam berdemokrasi yang ditunjukkan dari ketidakmampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah, rendahnya tanggung jawab, menurunnya nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, yang berakibat pada rendahnya rasa percaya diri peserta didik.

Gejala tawuran pelajar yang meningkat yang disertai dengan tindak kekerasan, rendahnya tanggung jawab, menurunnya nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, yang berakibat pada rendahnya rasa percaya diri peserta didik adalah sebuah contoh ketidakmampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah dan ketidakmampuan untuk menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan kebebasan individu dalam masyarakat atau nilai-nilai demokrasi.

Sebagai dampak lanjut dari situasi seperti ini biasanya melahirkan dampak sosial akibat penerapan suatu sistem pendidikan yang kurang tepat dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, dan perilaku demokratis apalagi berjalan dalam waktu yang panjang dan kurangnya pengalaman dalam mengolah konflik menjadi kekuatan integrasi. Salah satu alternatif strategisnya adalah dengan mempercepat transformasi mental berdemokrasi yang dibentuk oleh kesadaran berdemokrasi yang berbasis pada kekokohan dimensi emosional dan pengembangan tingkat demokratik warga negara.

Berbicara masalah demokrasi bukan hanya membicarakan masalah politik saja, namun secara otomatis akan membicarakan seluruh sistem yang ada dalam masyarakat seperti perilaku masyarakat berkaitan dengan ekonomi, sosial-budaya, wilayah dan sebagainya yang merupakan kajian ilmu pengetahuan sosial. Selain itu demokrasi hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan

dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang telah ditentukan. Tentu saja keputusan-keputusan yang diambil bukan hanya berkaitan dengan politik, namun melibatkan bidang-bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu antara pendidikan demokrasi dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang selanjutnya disingkat IPS saling berkaitan. IPS merupakan kajian yang dipelajari, dan demokrasi merupakan suatu proses dalam mempelajari IPS sekaligus menjadi tujuannya. Dengan perkataan lain, pendidikan demokrasi berlangsung ketika seseorang belajar IPS.

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Adapun ruang lingkupnya mengkaji masalah manusia, tempat, dan lingkungan; waktu, keberlanjutan, dan perubahan; sistem sosial dan budaya; dan perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

IPS pada prinsipnya mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, hukum, ilmu politik, antropologi, psikologi, dan filosofi. Materi tersebut dipelajari sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan ketrampilan warga negara dalam mengembangkan sikap kritis, membuat keputusan publik yang baik, mengembangkan sikap demokratis, sehingga menghasilkan warga negara yang baik.

Dengan kemampuan dan keterampilan demikian diharapkan warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Di Indonesia IPS merupakan nama dari mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, termasuk pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dalam proses pembelajarannya dibedakan antara IPS di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sedangkan PKn merupakan program pendidikan yang digunakan untuk membantu generasi muda memperoleh pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga, hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan peradilan serta dapat berpartisipasi aktif secara kritis-analitis, bersikap dan bertindak demokratis dengan penuh tanggung jawab.

Secara filosofis PKn adalah mengkaji bagaimana warga negara bertindak, dalam arti melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diketahui dan dipahami tentang kewarganegaraan, dan akhirnya dapat membuat keputusan-keputusan secara demokratis, cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai masalah baik pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.

PKn bisa merupakan bagian dari IPS (*social studies*) merupakan nama dari mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi dan termasuk pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, tetapi di Indonesia mata pelajaran ini dipisahkan, karena PKn dipandang sangat penting karena PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

PKn adalah suatu proses demokrasi secara nyata yang berlangsung secara terus menerus dalam suatu proses pendidikan yang panjang, merupakan program pendidikan yang digunakan untuk membantu generasi muda memperoleh pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga, hak asasi manusia, demokrasi, hukum dan peradilan serta dapat berpartisipasi aktif secara kritis analitis, bersikap dan bertindak demokratis dengan penuh tanggung jawab. Demokrasi merupakan salah satu prinsip PKn yang sekaligus sebagai salah satu materi dalam proses pembelajarannya. Artinya melalui PKn diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan secara nyata.

Posisi PKn dalam pendidikan demokrasi adalah sebagai program pendidikan atau mata pelajaran yang memuat materi tentang demokrasi. Dengan kata lain, proses pendidikan demokrasi diimplementasikan melalui PKn. Dengan demikian, PKn merupakan salah satu sarana bagi pemerintah/negara/masyarakat untuk memberikan pendidikan demokrasi bagi warga negaranya. Bahkan sebenarnya pendidikan demokrasi ini dapat dipelajari pada mata pelajaran lain seperti sejarah, etika atau ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007:217) bahwa Pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai *“isolated subject”* yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan lagi, tetapi *“It is linked to nearly everything else that students learn in school-whether it be history, civics, ethics, or economics- and too much that goes on outside of school”*.

Dengan pemahaman tersebut, maka pendidikan demokrasi sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran PKn, karena terdapat beberapa mata pelajaran lain yang memang relevan untuk mengembangkan pendidikan demokrasi. Selain itu, pendidikan demokrasi pun tidak hanya dipelajari di dalam kelas atau sekolah, namun dapat dipelajari di masyarakat secara umum karena implementasi dari konsep demokrasi secara nyata selain terdapat di kelas atau sekolah juga banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu secara teoretik pendidikan politik pada hakekatnya merupakan aset dalam upaya memperkuat demokrasi, dimana posisi dan perannya tidak terlepas dari wacana demokrasi itu sendiri. Pendidikan politik dan demokrasi akan banyak ditentukan oleh kualitas pemahaman, sikap dan kemampuan demokrasi para warga negara. Dalam konteks pendidikan, maka sulit dibantah bahwa pendidikan politik secara konseptual akan memiliki peran optimal dalam menciptakan kehidupan politik tersebut, manakala didukung oleh kemampuan penegakan nilai-nilai kebebasan individu warga negara dalam mencapai keinginan atau cita-cita masyarakat berdemokrasi. (Al Muchtar; 2003)

Dalam konteks ini mencerdaskan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu yakni kehidupan berdemokrasi Pancasila menjadi sangat penting, terlebih manakala dipandang dalam perspektif transformasi kepada masyarakat madani (*civil society*) yang dipandang tepat sebagai arah dan orientasi perubahan masyarakat Indonesia baru.

Beberapa faktor yang lainnya juga turut menentukan kualitas kehidupan demokrasi adanya intervensi nonkependidikan baik pada masa orde baru maupun pada

masa sekarang yang tidak dapat dihindari sebagai pengaruh lingkungan sosial budaya politik yang sedang menguat pada latar pendidikan tersebut. Orientasi kepentingan warga negara tergeser oleh kepentingan kekuasaan, sehingga terjadi duplikasi dengan pendidikan politik praktis seperti tampak jelas baik pada bentuk isi maupun model pembelajarannya.

Pengalaman empirik menunjukkan bahwa secara umum pengembangan dan implementasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya dalam disertasi ini disingkat PKn selama ini telah mengakibatkan terjadi perubahan mendasar pada suatu konsep ditinjau dari segi ilmu pengetahuan dalam hal ini menurut Al Muchtar terjadi pergeseran epistemologis dari tradisi "*Citizenship education*" menjadi "*political education*" dalam kurikulum sekolah. Hal ini menyebabkan kadar pendidikan demokrasi menjadi lemah.

PKn atau *Citizenship Education* dalam tatanan konsep memiliki potensi dan posisi yang strategis sebagai pendidikan demokrasi yang dikembangkan dalam mendesain konsep-konsep aktual sebagai landasan utama tradisi *Citizenship education* karena program pendidikan ini mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga peserta didik memiliki wawasan dan kemampuan untuk berpikir, bersikap dan bertindak demokratis sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila.

Untuk membentuk warga negara yang sejalan dengan cita-cita demokrasi, proses pembelajaran Pkn mengarahkan siswa faham demokrasi Pancasila karena ia bukan hanya belajar tentang demokrasi melainkan belajar melalui hidup berdemokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara demikian, maka belajar hidup berkewarganegaraan sesuai dengan orientasinya ialah mengembangkan: warga negara

yang cerdas (*civic intelligence*) baik intelektual, sosial, emosional, dan spiritual; warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan warga negara yang mau dan mampu berpartisipasi (*civic participation*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Pada kerangka implementatif, penelitian dan berbagai kajian selama ini mengungkapkan bahwa kelemahan implementasi kurikulum program pendidikan selama masa Orde Lama ternyata dikembangkan lebih kuat sebagai pendidikan politik dalam makna yang sempit dari pada sebagai pendidikan demokrasi. Akibat dari orientasi di atas, maka lebih banyak terdapat materi yang berisi konsep-konsep politik praktis, di samping itu proses dan arah menyajikannya cenderung sebagai "*proses indoktrinasi*" sehingga terjadi "*kontraproduktif*" terhadap upaya memperkuat kehidupan konstitusional yang demokratis.

Sementara itu praktik PKn di sekolah menemui beberapa hambatan seperti sekolah selama ini terkesan menjadi alat birokrasi dari sistem pendidikan Indonesia yang sentralistik, sehingga lebih bersifat birokratis daripada demokratis. Pendidikan demokrasi di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PKn cenderung hanya mengajarkan tentang demokrasi (*teaching about democracy*), belum sampai pada mengajar dalam suasana demokrasi (*teaching in democracy*) dan belum menumbuhkan jiwa demokrasi (*teaching for democracy*).

Namun apabila dikaji lebih mendalam, kita akan dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada sebagian besar SMP dengan standar pendidikan disebutkan adanya beberapa kesalahan pandangan yang muncul dalam mensikapi perubahan pendidikan kewarganegaraan ini, jika diringkas adalah sebagai berikut: (1)

Pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baru ini tidak lebih dari pelajaran Kewarganegaraan masa lalu atau kita kembali pada mata pelajaran kewarganegaraan, Civics, atau Kewargaan Negara di tahun 1960-an; (2) Pandangan bahwa pelajaran PKn baru adalah gabungan saja dari pelajaran PPKn dan pelajaran Tata Negara yang diajarkan pada sekolah-sekolah menengah atas sekaligus pula porsi pelajaran Tata Negara mendapat tempat yang lebih pada pelajaran baru ini; (3) Pandangan bahwa dengan pelajaran PKn baru akan semakin mudah dan enak dalam mengajarkan karena lebih banyak materi sehingga tidak akan kehabisan materi sebagaimana dalam mengajarkan PPKn. (Depdiknas, Standar Nasional KTSP, 2006)

Isu-isu tersebut didukung pula oleh berbagai permasalahan yang muncul diantaranya adalah kualitas penyelenggaraan kelas yang berpengaruh besar terhadap pengembangan pemahaman, nilai-nilai, dan perilaku demokratis karena kelas merupakan tempat atau wahana yang strategis untuk pengembangan potensi siswa. Dalam lingkungan kelas, siswa beraktivitas dengan seluruh komponen lainnya. Atas dasar itu, kelas juga dikatakan sebagai suatu masyarakat kecil (*mini society*).

Aktivitas di dalam kelas merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada proses pelayanan pedagogik untuk pengembangan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Oleh karena itu, kelas harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman, dan aman untuk belajar bagi seluruh siswa. Kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan tenaga kependidikan lainnya seperti pegawai perpustakaan harus menjadi tenaga profesional yang selalu dan secara terus menerus mampu berinovasi, berkreasi, dan berimprovisasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan dan pemberdayaan potensi siswa.

Persoalan-persoalan tersebut diharapkan mampu terpecahkan melalui perbaikan kualitas pembelajaran dan dipandang perlu adanya transformasi dalam kelas tradisional menuju kelas demokratis. Untuk membentuk warga negara yang sejalan dengan cita-cita demokrasi, proses pembelajaran Pkn mengarahkan siswa faham demokrasi karena ia bukan hanya belajar tentang demokrasi melainkan belajar melalui hidup berdemokrasi. Dengan cara demikian, maka belajar hidup berkewarganegaraan sesuai dengan orientasinya ialah mengembangkan: warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) baik intelektual, sosial, emosional, dan spiritual; warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan warga negara yang mau dan mampu berpartisipasi (*civic participation*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peran guru pada kelas demokrasi mengembangkan situasi belajar tertentu melalui berbagai pendekatan untuk membantu perkembangan siswa, menciptakan situasi pembelajaran yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara optimal, bentuk belajar itu sendiri terkait dengan karakteristik bahan atau materi yang dipelajari, guru memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran siswa tentang konsep dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga terbiasa untuk menerima pendapat atau berbeda pendapat dengan siswanya. Para siswa sendiri cenderung untuk aktif mengemukakan pendapat yang berbeda dengan guru dan menghargai perbedaan pendapat dengan teman-temannya, partisipasi yang sama oleh semua warga kelas yang ditandai dengan partisipasi yang sama dan bebas dalam kelas atau dalam proses pembuatan keputusan suatu kelompok, Sementara itu, iklim belajar di kelas pun cenderung bersifat belajar secara kooperatif. Jadi, kehidupan kelas mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Upaya untuk menciptakan ruang publik bagi siswa akan membuka pintu komunikasi bagi penyelesaian masalah di dalam kelasnya. Hal ini sangat baik dalam konteks demokratisasi karena setiap siswa akan belajar untuk mengendalikan diri, menyelesaikan masalah secara bersama sama, dan menunjukkan kemampuan berkolaborasi. Ruang publik menjadi arena untuk membicarakan, mendiskusikan, dan memperdebatkan masalah secara terbuka, jujur, adil, dan kreatif. Penciptaan kondisi semacam ini akan mengakibatkan pintu komunikasi dan penyaluran pesan sehingga akan mewariskan siswa yang hanya mampu berbicara dengan dirinya sendiri atau dengan perkataan lain siswa yang pasif.

Kehidupan faktual kelas merupakan potret nyata dari kehidupan demokrasi di sekolah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tim peneliti dari UPI dalam rangka pengembangan nilai-nilai demokrasi di lingkungan Diknas Yogya, Jawa Tengah maupun Banten tahun 2001, dapat disimpulkan kehidupan demokrasi di kelas adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1.

Hasil Penelitian Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi Di Lingkungan Diknas
Yogya, Jawa Tengah dan Banten tahun 2001

No	Hasil Penelitian
(1)	Kebebasan sebagian besar guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, menjelaskan topik yang akan diajarkan, menerangkan materi dengan gamblang. Hanya dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, PMPKN, Sejarah, Ekonomi dan Geografi cenderung terlampau padat informasi, sehingga tidak banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencerna, menyimak, memahami teori yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikhawatirkan materi tidak bermakna dan mengendap lebih lama;

(2)	Kebersamaan dalam proses pembelajaran tercermin dari adanya motivasi dari guru untuk melibatkan siswa secara optimal dalam pembelajaran. Kesempatan untuk bertanya kepada siswa telah diberikan oleh sebagian besar guru, hanya dalam mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan konsisten menarik perhatian siswa masih terbatas. Guru cenderung bersifat formal dan kaku dalam mengajarkan materi, kurang begitu aktif menggiring siswa kedalam proses pembelajaran yang penuh makna;
(3)	Keadilan, usaha guru untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban siswa di kelas sudah cukup tinggi, tidak memihak siswa berdasarkan suku atau agama. Sekolah yang bernuansa agama tertentu (swasta) secara kelembagaan telah memfilter para siswa, sehingga homogen dalam beragama
(4)	Kepastian hukum, dari seluruh kelas yang diobservasi siswa sudah masuk dan keluar kelas dengan tertib, sudah mempergunakan seragam dan atribut yang telah ditentukan dan memiliki buku ajar yang dianjurkan. Hanya perhatian guru kepada siswa yang acuh tak acuh terhadap pelajaran masih kurang.

Optimalisasi peran guru di kelas dalam melaksanakan pendidikan demokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurikulum yang terlalu berfokus pada pencapaian materi, kepadatan murid dalam kelas, beban tugas mengajar, pengalaman mengajar, dan keberadaan fasilitas sekolah yang dapat mengekspresikan minat, bakat dan kemampuan guru serta siswa secara optimal.

Gambaran di atas memperlihatkan permasalahan pembelajaran tradisional pada lembaga-lembaga pendidikan di negara kita. Belum lagi penilaian tradisional yang bersifat sesaat, karena sampai saat ini sistem penilaian kita di sekolah baru sekedar meliputi tiga komponen yaitu tugas, ulangan harian, dan ulangan akhir semester. Menurut Azra (2003), kegagalan dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi untuk pembentukan cara berpikir (*world view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan pendidik dan masyarakat sekolah umumnya bersumber dari tiga hal.

Pertama, secara substantif, PKn tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan.

Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat *indoktrinatif, regimentatif; monologis* dan tidak *partisipatif*. Ketiga, ketiga subyek itu lebih teoritis dari pada praktis. Akibatnya terdapat *diskrepansi* yang jelas diantara teori dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada, bahkan pada tingkat sekolah sekalipun, *diskrepansi* itu sering pula terlihat dalam bentuk *otoritanisme* bahkan *feodalisme* orang-orang sekolah itu sendiri. Akibatnya bisa dipahami, kalau sekolah gagal membawa peserta didik untuk mengalami demokrasi.

PKn untuk Indonesia secara filosofik dan substantifpedagogis/andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan. PKn merupakan mata pelajaran wajib pada semua satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Aspek-aspek yang menjadi lingkup mata pelajaran ini, mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak azasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Walaupun dalam enumerasinya Pancasila ditempatkan sejajar dengan aspek lain, namun dalam pengorganisasian isi dan pengalaman belajar hendaknya ditempatkan sebagai *core atau*

concerto dalam *orkestrasi* kesemua aspek untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Pancasila secara generik.

Dengan demikian untuk pendidikan dasar dapat dikembangkan Kelas sebagai Laboratorium Demokrasi Pancasila yang selanjutnya disingkat KSLDP yang sesuai dengan anak usia SMP yang secara psikologis masih dalam proses perkembangan menuju kematangan Pada tataran psikososial-individual dan kolektif, Pancasila dilihat sebagai sistem nilai moral yang seyogyanya diwujudkan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial-kultural individu dalam keseharian kehidupan berinteraksi dalam kelas Karena itu Pancasila harus diperlakukan sebagai *sumber* rujukan perilaku yang perlu diinternalisasi oleh peserta didik sebagai individu dalam perannya sebagai anggota kelas, komponen sekolah, dan warga negara Indonesia.

KSLDP sebagai proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural. Karena itu inti dari KSLDP adalah belajar atau learning. Proses belajar merupakan misi utama dari proses pembelajaran. Secara normatif, dalam Pasal 1 butir 20 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa "Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi objektif sebagaimana telah diuraikan diatas, tampaknya dipandang perlu untuk mengembangkan Model Kelas sebagai Laboratorium Demokrasi Pancasila yang selanjutnya dalam disertasi ini disingkat KSLD, yang dianggap sebagai suatu pendekatan strategis dalam transformasi kelas PKn non

demokratis menuju kelas sebagai Laboratorium demokrasi sesuai dengan Pancasila dalam membangun pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis di SMP. Model KSLDP dibangun secara internal oleh semua unsur kelas secara sinergis.

Dengan demikian, dari KSLDP membantu subjek didik menemukan dan menguasai nilai-nilai mereka sendiri secara lebih berarti dan pasti, menemukan atau mengungkapkan nilai-nilai pribadinya, membina dan mempribadikan (*personalisasi*) nilai moral tumbuh kesadaran dan keterbukaan yang ditopang oleh prinsip-prinsip toleransi, kebersamaan, dan keadilan sesuai Pancasila disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, bahan pelajaran, waktu dengan media yang ada, keadaan siswa, minat dan kondisi.. Namun demikian, persoalan yang muncul sekaligus merupakan permasalahan umum dalam penelitian ini adalah: belum ada Model KSLDP yang dapat menjembatani proses transformasi kelas non demokrasi menuju kelas sebagai laboratorium demokrasi Pancasila antara siswa dan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan sekolah, maupun siswa dengan lingkungan luar sekolah sebagai sumber belajar).

Pengembangan KSLDP ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu model pembelajaran PKn untuk Indonesia secara filosofik dan substantive pedagogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan dalam pengorganisasian isi dan pengalaman belajar ditempatkan sebagai *core atau concerto* dalam harmonisasi kesemua aspek untuk mencapai tujuan akhir dari KSLDP secara generik.

Model pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah diatas melalui pengembangan Model KSLDP, seperti diketahui program Model KSLDP yang dikembangkan memiliki nilai strategis, karena sampai saat ini peserta didik yang mampu menerapkan pemahaman, nilai-nilai, dan perilaku demokratis sangat terbatas. Oleh karena itu program Model KSLDP diharapkan mampu mengembangkan: warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) baik intelektual, sosial, emosional, dan spiritual; warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan warga negara yang mau dan mampu berpartisipasi (*civic participation*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun demikian masalah-masalah baru sehubungan dengan pengembangan model KSLDP tersebut muncul dan berkembang disebabkan oleh rendahnya kemampuan guru itu sendiri, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan faktor pendukung yang dianggap mampu memberikan nilai tambah bagi keberhasilan Model KSLDP diantaranya berkaitan dengan potensi individu guru untuk mengembangkan kemampuan diri dan profesi.

Keterampilan berdemokrasi tidak mungkin hanya ditumbuhkan melalui pengajaran saja, namun harus didukung dengan pelatihan diri dan pembinaan secara intensif melalui pembiasaan. Kesempatan berdemokrasi akan mudah dipahami apabila peserta didik memiliki pengalaman praktis dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi yang telah dipahaminya. Kendala-kendala yang ada di kelas dapat diatasi melalui program Implementasi KSLDP.

Model KSLDP pada konteks PKn, baik secara konseptual maupun implementatif, memiliki dimensi mendasar sebagai sebuah strategi pendekatan

pembelajaran yang mengarah kepada tujuan membekali para siswa dengan kemampuan dan keterampilan berdemokrasi, turut serta secara proaktif dalam membantu mengembangkan atau mendorong pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan, yang ditangani secara profesional, dikembangkan secara terpadu, teratur, direncanakan dan disusun secara matang dan ditunjang oleh fasilitas yang memadai.

Dengan demikian untuk pendidikan dasar dalam hal ini SMP dapat dikembangkan PKn yang koheren dengan pendidikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan anak usia sekolah yang secara psikologis masih dalam proses perkembangan menuju kematangan. Pada tataran psikososial-individual dan kolektif, Pancasila harus dilihat sebagai sistem nilai moral yang seyogyanya diwujudkan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial-kultural individu dalam keseharian kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Karena itu Pancasila harus diperlakukan sebagai sumber rujukan perilaku yang perlu diinternalisasi oleh individu dalam perannya sebagai anggota masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Model KSLDP memiliki ciri-ciri yang mendasar sebagai sebuah strategi pendekatan proses pembelajaran PKn sangat terkait dengan nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi positif warga negara dengan menekankan dan mendorong pengembangan kesadaran peserta didik akan pentingnya demokrasi dan kemampuan untuk hidup dalam alam demokrasi. Namun demikian secara implementatif konsepnya masih dalam batas-batas minimal sebagai sebuah interaksi sosial yang terjadi dalam kemasapan pembelajaran

antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, dan peserta didik dengan lingkungan belajar.

Sebagai sebuah bentuk kasus yang coba dianalisis dari pengalaman lapangan yang dilakukan SMP Negeri di Bandung diketahui, bahwa program PKn yang dikembangkan ternyata belum dilakukan secara optimal dan terprogram secara sistematis, melainkan dilakukan secara spontan dengan cara yang ditetapkan sendiri oleh guru di kelas. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan bersifat individual dan mengarah kepada diskusi.

Sehubungan dengan pemikiran-pemikiran diatas, menunjukkan perlunya pengembangan model KSLDP yang mampu memberi peluang pada peserta didik dalam praktik demokrasi dengan kemas KSLDP tanpa menghilangkan karakteristik PKn. Pengembangan pendidikan demokrasi dapat dilihat dari berbagai dimensi. Penelitian ini berusaha mengembangkan salah satu dimensi, yaitu Pengembangan Model KSLDP dalam mata pelajaran PKn.

Mengacu pada latar belakang dan masalah-masalah diatas, maka salah satu isu yang dianggap paling menyentuh permasalahan pengajaran PKn adalah pentingnya peningkatan pemahaman, nilai-nilai, sikap dan perilaku demokratis siswa di SMP.

Mengingat luasnya ruang lingkup masalah diatas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada: “Bagaimana Transformasi Model Kelas Non Demokrasi Kepada Kelas sebagai Laboratorium Demokrasi Pancasila (KSLDP) dalam Pembelajaran Demokrasi dalam menanamkan Pemahaman, Nilai-nilai, Sikap, dan Perilaku Demokratis Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui PKn di Kota Bandung?”

Atas dasar hal tersebut penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan pengembangan Model KSLDP di SMPN di Kota Bandung.

Sebagai panduan dalam penelitian ini, permasalahan umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan menjadi masalah khusus yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Kondisi guru, siswa, dan fasilitas dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn yang dilaksanakan di SMPN saat ini yang meliputi pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana rencana desain dan pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa melalui PKn yang berlangsung selama ini?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis melalui PKn yang berlangsung selama ini?
 - 3) Bagaimana kemampuan dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa melalui PKn yang berlangsung selama ini?
 - 4) Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis melalui PKn yang berlangsung selama ini?
 - 5) Bagaimana ketersediaan fasilitas atau sumber belajar dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa melalui PKn yang berlangsung selama ini?

2. Model KSLDP yang cocok dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa pada mata pelajaran PKn di yang meliputi pertanyaan:
 - 1) Bagaimana desain model KSLDP yang cocok dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa di SMP?
 - 2) Bagaimana langkah-langkah pengembangan model KSLDP yang cocok dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa di SMP?
 - 3) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran model KSLDP yang dikembangkan dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa di SMP?
3. Bagaimanakah implementasi model KSLDP yang menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa di SMP?
4. Bagaimanakah respon siswa terhadap implementasi model KSLDP yang dikembangkan dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis siswa di SMP?

C. Pembatasan Masalah Penelitian

1. Spesifikasi Model Pengembangan

Berpijak dari permasalahan diatas, untuk memperoleh kesamaan pandangan dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Model KSLDP yang dianggap sebagai suatu pendekatan strategis dalam proses pembelajaran PKn menanamkan pemahaman, nilai-nilai, dan perilaku demokratis di SMP. Pendidikan Demokrasi dalam model KSLDP dibangun secara internal oleh semua unsur kelas secara sinergis. Dengan demikian, dari kelas itu akan tumbuh

kesadaran dan keterbukaan yang ditopang oleh prinsip-prinsip toleransi, kebersamaan, dan keadilan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai suatu pendekatan strategis dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, tujuan utama kelas yang demokratis adalah saling tukar gagasan; menggunakan refleksi dan analisis kritis, dan meningkatkan kebaikan umum.

Dalam model KSLDP, siswa mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara aktif, yang juga membuat kemungkinan bagi mereka untuk tenang atau yakin dalam menghadapi segala tantangan. Berpartisipasi dalam kelas yang demokratis dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, membantu untuk mempersiapkan siswa menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Di samping itu juga, kelas yang demokratis akan meningkatkan hubungan dan lingkungan yang mendukung dan aman dalam suatu komunitas kelas.

2. Definisi Operasional

Berpijak dari permasalahan diatas, untuk memperoleh kesamaan pandangan dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penelitian ini, maka dibuat batasan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pengembangan model adalah proses kegiatan penelitian untuk menghasilkan suatu model pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan analisis, desain, implementasi dan evaluasi, (Wiles, J & Bondi, J : 1989:18). Dengan demikian yang dimaksud dengan model dalam disertasi ini adalah proses kegiatan penelitian untuk menghasilkan suatu model strategi pendekatan KSLDP yang

dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan, desain model, implementasi model, dan evaluasi model

- 2) Peningkatan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran siswa berada dalam posisi proses mental yang aktif dan guru berfungsi mengkondisikan terjadinya pembelajaran. Guru dalam kelas yang demokratis mengambil peran untuk mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran, menentukan interaksi kelas, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara antara satu dengan yang lainnya dan juga saling bertanya.
- 3) Kelas adalah media/lingkungan wahana pengembangan demokrasi untuk itu perlu dilakukan revitalisasi kelas dalam rangka pengembangan lingkungan kelas yang kondusif bagi praktik pembelajaran PKn, dimana siswa mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara aktif, membantu mempersiapkan siswa menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan hubungan dan lingkungan yang mendukung dan aman dalam suatu komunitas kelas, sehingga membuat kemungkinan bagi mereka untuk tenang atau yakin dalam menghadapi segala tantangan.
- 4) Sebagaimana diyakini bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya dalam disertasi ini disingkat PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam arti yang luas memegang peran yang strategis, karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia. Proses demokratisasi yang harus

dikembangkan bukanlah hanya untuk berdemokrasi hari ini, tetapi lebih jauh lagi untuk berdemokrasi di hari esok.

- 5) Esensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah *“the development of democratic ideals, values, norms, knowledge, and skills psychologically and socially facilitating citizens as well as society to perform their respects and responsibility as intelegent and socially responsible social actors and leaders of and in society”* (CICED, 1999: 4).
- 6) Warga negara Indonesia yang demokratis itu adalah mereka yang secara konsisten memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.
- 7) Laboratorium dalam perspektif ilmu-ilmu sosial mempunyai arti sebagai suatu *“situs”* transformasi yang digunakan untuk mempraktikkan prinsip-prinsip (*principles*) atau nilai-nilai (*values*) dengan menggunakan metode-metode pembelajaran ilmiah (*scientific-instructional methods*). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *“situs”* adalah *“kelas yang dijadikan sebagai laboratorium demokrasi”* (*classroom as democratic laboratory*). Dalam hal ini kelas dijadikan situs untuk mempraktikkan prinsip-prinsip (*principles*) atau nilai-nilai (*values*) demokrasi dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran ilmiah (*scientific-instructional methods*).
- 8) Model KSLDP yang dianggap sebagai suatu pendekatan strategis dalam menanamkan pemahaman, nilai-nilai, dan perilaku demokratis peserta didik di

SMP dalam pembelajaran PKn melalui model KSLDP yang dibangun secara internal oleh semua unsur kelas secara sinergis, dari kelas itu akan tumbuh kesadaran dan keterbukaan yang ditopang oleh prinsip-prinsip toleransi, kebersamaan, dan keadilan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan kelas, tujuan utama KSLDP adalah saling tukar gagasan, menggunakan refleksi dan analisis kritis, dan meningkatkan kebaikan umum.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan model KSLDP pada SMPN di Kota Bandung, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk data hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, guna membantu memecahkan permasalahan pembelajaran PKn sebagai pembelajaran demokrasi yang dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada dan diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik, dalam rangka peningkatan kualitas implementasi kurikulum yang berlaku di SMP Kota Bandung, serta menemukan strategi pendekatan konsep, prinsip, abstraksi model pembelajaran dalam upaya penanaman demokratisasi dalam ruang kehidupan kelas, serta upaya penumbuhan budaya demokrasi yang dilakukan sekolah.

Pertimbangan praktis KSLDP, yaitu: pertama, untuk memberikan pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi; *kedua*, penerapan *rule of the law* di kelas sebagai salah satu pilar demokrasi; ketiga, pengutamaan dan penguatan keterampilan partisipatif untuk memberdayakan siswa dalam merespon dan menyelesaikan masalah-

masalah mereka secara demokratis; dan keempat, pengembangan budaya demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan siswa dan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- 1) Memperoleh gambaran tentang model empiris KSLDP dalam transformasi kegiatan pembelajaran PKn pada kelas non demokratis menuju kelas sebagai laboratorium demokrasi yang telah di validasi dan diuji coba. Apakah model KSLDP dapat berfungsi dalam proses transformasi penanaman budaya demokrasi pada tataran peserta didik dan pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi antara siswa dalam kehidupan kelas. Penelitian diarahkan untuk menangkap konsep, prinsip, abstraksi model KSLDP dalam penanaman pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis.
- 2) Peneliti berusaha mendapatkan gambaran mengenai cara-cara mendiagnosis mengenai kebutuhan belajar, menetapkan tujuan kegiatan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar yang tepat dalam mengevaluasi kemajuan program-program yang bercirikan model KSLDP.
- 3) Mendeskripsikan data tentang kemungkinan tumbuhnya peserta didik yang demokratis, saling tukar gagasan, menggunakan refleksi dan analisis kritis, dan meningkatkan kebaikan umum, dan mendeskripsikan data tentang implementasi model KSLDP dalam kegiatan pembelajaran PKn melalui uji coba. Peneliti berusaha mendeskripsikan model KSLDP dalam kegiatan pembelajaran PKn yang dilandasi prinsip-prinsip saling tukar gagasan, menggunakan refleksi dan analisis kritis, dan meningkatkan kebaikan umum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sumbangan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan dan kajian PKn, khususnya bagi penguatan program pembelajaran berupa upaya menegakkan dalil-dalil atau prinsip-prinsip yang didasarkan pada pengembangan model KSLDP yang dikembangkan dalam kajian bidang studi PKn mampu memberikan nuansa inovatif bagi lahirnya model-model pembelajaran baru dalam konsep berkaitan dengan penanaman kemampuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Disamping itu temuan penelitian ini akan memperluas kajian materi-materi yang dikembangkan dalam PKn. Secara praktis manfaat penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada guru, peserta didik, maupun sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penerapan model KSLDP hasil pengembangan ini selain memberikan manfaat teoritik juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yakni:

- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu/teori pemberdayaan, pembelajaran, serta perubahan sosial/sikap untuk kepentingan pengembangan konsep teori-teori PKn,
- 2) Bermanfaat sebagai bahan kajian bagi pihak--pihak- yang berkepentingan dalam rangka pembinaan nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis,

- 3) Bermanfaat sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang berniat untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

F. Asumsi

Asumsi yang mendasari penelitian tentang pengembangan Model KSLDP ini adalah:

- 1) Pembinaan demokrasi di sekolah dapat dilakukan melalui program yang sengaja diciptakan untuk menanamkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Mata pelajaran PKn saja tidaklah cukup untuk membina siswa menjadi demokratis, tanpa didukung oleh penciptaan lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif yakni sebuah lingkungan sosial yang mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi.
- 2) Dalam lingkungan sekolah terjadi interaksi sosial antara kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga karyawan, yang dilatarbelakangi oleh saling membutuhkan; sementara di lingkungan kelas terjadi interaksi yang intensif antara guru dan siswa, serta antar siswa sendiri. Jika interaksi sosial di sekolah dan kelas itu bila dilandasi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi, maka akan tercipta sebuah lingkungan sosial yang demokratis.
- 3) Iklim atau suasana kelas yang tertata dengan baik merupakan salah satu prasyarat yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan KSLDP. Suasana kelas yang tertata dengan baik, kondisi lingkungan atau iklim kelas yang nyaman, menyenangkan dan dinamis dapat menunjang efektifitas kegiatan pembelajaran meliputi: proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan motivasi, latar belakang, dan kesiapan

dalam belajar, aktivitas yang optimal dalam belajar, belajar individu yang berkolaborasi dengan kelompok dalam mengembangkan bakat dan minat, serta kemampuan berpikirnya. Dengan penataan tersebut diharapkan kelas sebagai situs atau wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dapat diwujudkan.

- 4) Kurikulum dimaknai sebagai seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik di bawah arahan dan bimbingan guru melalui program-program yang amat variatif, tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, tapi juga di luar kelas seperti lapangan tempat mereka bermain, dan bahkan di kantin sekolah. Semua itu memberikan kontribusi pengembangan siswa, yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada mereka.
- 5) Demokrasi bukan hanya masalah prosedural atau bentuk pemerintahan, tetapi merupakan suatu *way of life*. Sebagai *way of life* dari suatu komunitas tidak mungkin dicapai tanpa melalui proses pendidikan. Proses pendidikan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses demokrasi (John Dewey).
- 6) Pendekatan model pembelajaran KSLDP memiliki prinsip dasar yang kuat seperti prinsip belajar siswa aktif seperti kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan *reactive teaching*. Di samping itu, pendekatan model pembelajaran KSLDP ini memiliki landasan pemikiran yang kuat yaitu membelajarkan kembali (*Reduksi*), dan merefleksi pengalaman belajar. Pendekatan model KSLDP memungkinkan siswa untuk: 1) berlatih memadukan antara konsep/teori yang diperoleh dari penjelasan guru atau dari buku referensi dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2) siswa diberi kesempatan

untuk mencari informasi di luar kelas baik informasi yang sifatnya benda/bacaan. Penglihatan obyek langsung TV/radio/internet maupun orang/pakar/tokoh, 3) membuat alternatif untuk mengatasi masalah dari topik/objek yang dibahas, 4) membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) yang berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan 5) merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

G. Kerangka Penelitian

Pengembangan model KSLDP sebagai proses pembelajaran PKn melibatkan peran aktif peserta didik di kelas. Hal ini dimaksudkan agar penanaman pemahaman, nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis peserta didik terbentuk dengan sendirinya terutama melalui interaksi pembelajaran, keterampilan, dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Model KSLDP yang dilakukan dalam program PKn merupakan suatu model pembelajaran yang bersifat inovatif dan memiliki potensi positif bagi penanaman nilai-nilai, sikap, dan perilaku demokratis peserta didik. Dalam proses interaksi pembelajaran.

Beberapa faktor yang dapat dianalisa dan dianggap memberi pengaruh terhadap proses implementasi model KSLDP, antara lain kurikulum, manajemen kelas, strategi pembelajaran, serta sistem evaluasi. Komponen-komponen tersebut satu sama lain terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu hal yang dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan pembelajaran di kelas. Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan model

KSLDP dalam program PKn adalah iklim atau situasi pembelajaran yang terbangun sekolah yang dijadikan subjek penelitian, di antaranya adalah kebiasaan dan budaya demokrasi di kelas dan di luar kelas.

Mengacu pada kondisi tersebut, perlu dibangun sebuah model konseptual pembelajaran PKn dalam program KSLDP sehingga tercermin proses belajar yang mengacu pada nilai-nilai budaya belajar dan budaya demokrasi Pancasila di sekolah, baik dalam bangun kurikulum, manajemen, strategi pembelajaran, serta sistem pengawasan dan atau alat evaluasi. Sehingga model konseptual pengembangan program KSLDP yang berdasar pada komponen-komponen tersebut, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi para peserta didik melalui KSLDP. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka paradigima penelitian tentang pengembangan model KSLDP pada program PKn seperti pada Diagram 1.1.

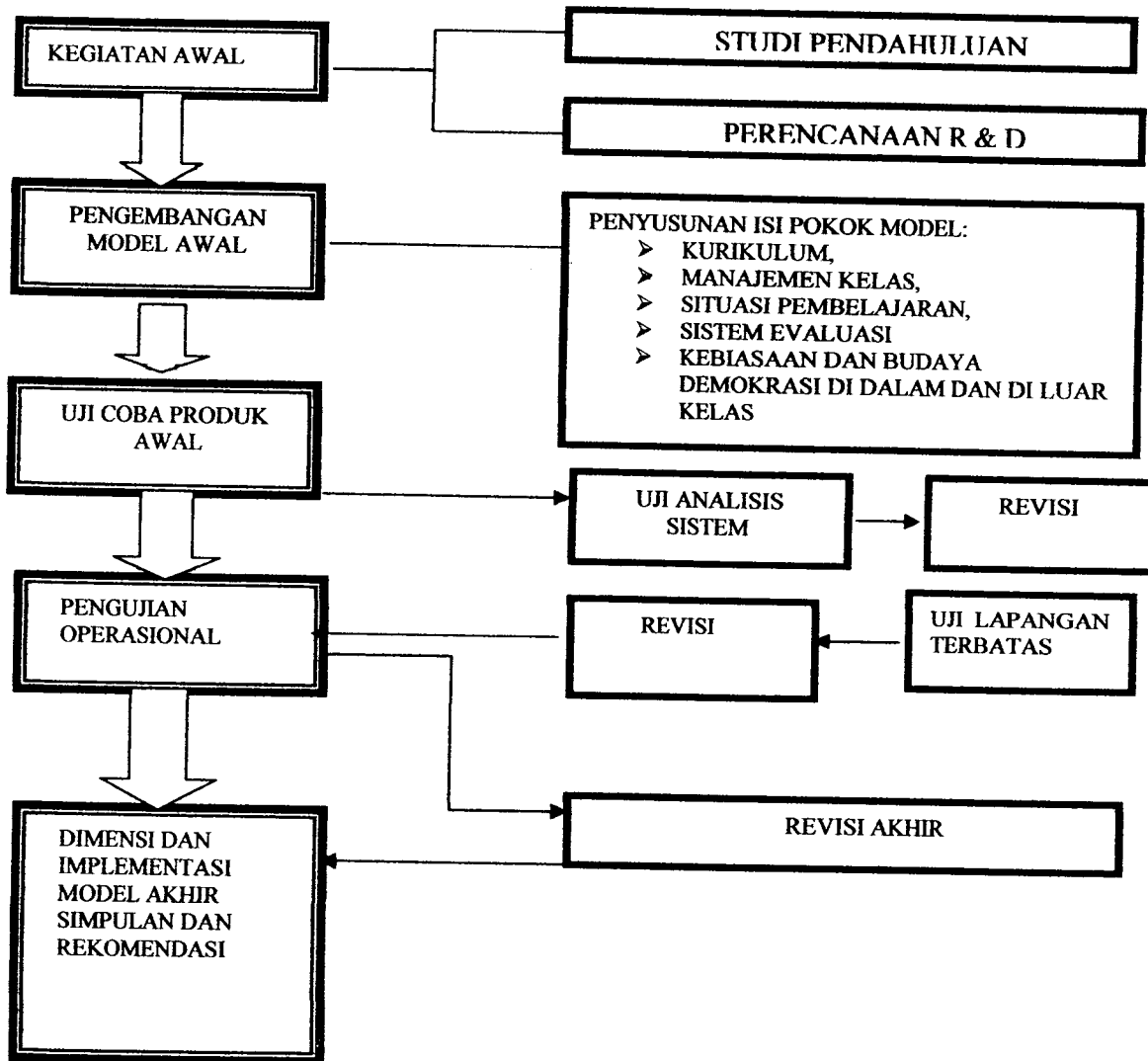


Diagram 1.1 Alur Kegiatan Penelitian dan Pengembangan